

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO

PESANTREN AND COMMUNICATION STRATEGY OF DERADICALITATION PROGRAM IN SUKOHARJO DISTRICT

Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

Program PKP Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

arkanudin_b@yahoo.com

ABSTRACT

The spread of religious radicalism in Indonesia has pervaded all levels of society without being able to be sorted are rigid. Responding to the situation, the government has taken concrete steps through the de-radicalization program. Among the de-radicalization program is anti-radicalization programs for the general public. Pesantren be one of the objectives of the program because it was realized that the pesantren become a target for the spread of radical efforts.(BNPT, 2013).

This study aims to identify the communication strategy of the government in Sukoharjo, Central Java in an effort to de-radicalization of religion. The study was conducted in three (3) pesantren in Sukoharjo, Central Java with a total sample of 367. The results showed that the de-radicalization communication planning model is a model of the stages of planning activities are not so different from the stages of communication planning model in community development activities by the government. Communication strategy undertaken in de-radicalization program is right and is able to convey the messages of de-radicalization and change the public perception of de-radicalization in particular on the communicator, message and media.

Keywords : Communication Strategy, Pesantren, Deradicalisation

ABSTRAK

Penyebaran radikalisme agama di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku. Merespon situasi tersebut, pemerintah telah melakukan langkah konkrit melalui program deradikalisasi. Di antara program deradikalisasi adalah program anti radikalisasi bagi masyarakat umum. Pesantren menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program tersebut, karena disadari bahwa pesantren menjadi salah satu target upaya penyebaran paham radikal.(BNPT, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam upaya deradikalisasi agama pada tahun 2018. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) Pesantren di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan

jumlah sampel sebanyak 367. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perencanaan komunikasi deradikalisasi merupakan model perencanaan yang tahapan-tahapan kegiatannya tidak begitu berbeda dengan tahapan-tahapan model perencanaan komunikasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Strategi komunikasi yang dilakukan dalam program deradikalisasi agama sudah tepat dan mampu menyampaikan pesan-pesan deradikalisasi dan mengubah persepsi masyarakat terhadap deradikalisasi khususnya pada aspek komunikator, pesan dan media.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pesantren, Deradikalisasi

A. Pendahuluan

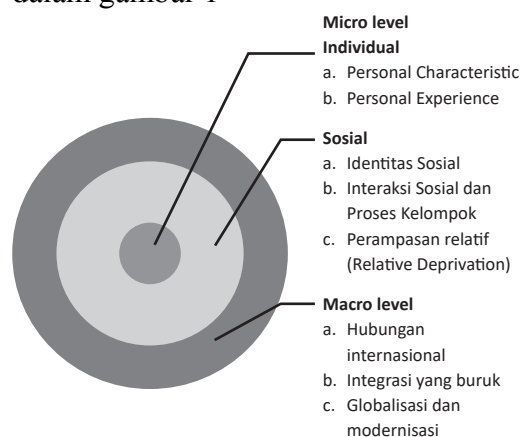
Realitas kekinian membuktikan bahwa radikalisme tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi isu global. Hampir di setiap negara menghadapi problem radikalisme, kendati dalam berbagai varian bentuk. Di berbagai belahan dunia terdapat kelompok radikal yang mengatasnamakan agama-agama semisal Kristen, Yahudi, Sikh, Hindu, Budha dan Islam.¹

Penyebaran radikalisme agama di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku, baik dari kategori usia, strata sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan maupun jenis kelamin. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan 48,9 % pelajar Indonesia di Jabodetabek menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama (LaKIP, Oktober 2010-Januari 2011). Survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di tahun 2010 yang dilakukan terhadap mahasiswa di Jawa juga menunjukkan 80,6 % responden memiliki kesetujuan terhadap piagam Jakarta sebagai dasar negara.²

Sementara Survei *The Pew Research Center* Amerika Serikat pada 2015 mengungkapkan sekitar 4 % atau sekitar 10

juta orang warga Indonesia mendukung ISIS dan sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak muda. Penelitian Maarif Institute digelar selama Oktober hingga Desember 2017 mengungkapkan pelajar SMA di Padang, Sukabumi, dan Surakarta dianggap paling rentan terpapar radikalisme.³

Akar penyebab radikalisme dapat dibedakan menjadi dua faktor utama yaitu level makro dan level mikro⁴ sebagaimana disajikan dalam gambar 1



Gambar 1 *Islamist Radicalisation: A Root Cause Model.*

Sumber: Veldhuis & Staun. 2009

3 Detik.com, Ma'arif Institute : *Ekstrakurikuler Pintu Masuk Radikalisme di Sekolah*, <https://m.detik.com/news/berita/d-3834483/maarif-institute-ekstrakurikuler-pintu-masuk-radikalisme-di-sekolah>, diakses tanggal 27 Januari 2018 jam 09.00 WIB

4 Tinka Veldhuis & Jorgen Staun, *Islamist Radicalisation: A Root Cause Model*, (Den Hag : Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009) p 24

1 BNPT, *Blueprint Deradikalisasi*, (Jakarta : BNPT,2013) p 2

2 BNPT, *ibid*, p 19

Merespon hal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah konkrit diantaranya adalah melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya membendung laju radikalisme karena gerakan radikalisme berorientasi pada arah kekerasan, peperangan dan teror.⁵ Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 tentang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Tugas pokok dan fungsi BNPT adalah untuk merumuskan kebijakan, strategi, program nasional serta menjadi koordinator dalam angka penanggulangan terorisme yang terdiri dari bidang pencegahan, penindakan dan kerjasama internasional.

Program deradikalisasi dilaksanakan dalam strategi kontra-radikalisasi bagi orang-orang yang kembali dari wilayah konflik, strategi deradikalisasi bagi orang-orang yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemsyarakatan dan strategi anti-radikalisasi bagi masyarakat umum. Salah satu sasaran strategi anti-radikalisasi adalah pesantren. Karena pesantren menjadi salah satu target upaya penyebaran paham radikal. Di sisi lain Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. C Geertz menyebut pesantren sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) telah menunjukkan perannya secara nyata dalam proses pembentukan dan pembangunan bangsa (*nation building*)⁶. Dan dalam setiap masa dalam rentang sejarah nusantara, pesantren mengambil peran-peran strategis berdasarkan

kebutuhan masyarakatnya. Pada zaman penjajahan, pesantren mengambil peran strategis sebagai basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi⁷

Program deradikalisasi memfokuskan kegiatannya pada tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan dan kebangsaan para pelaku tindak pidana terorisme, keluarga, jaringan dan orang/kelompok potensi radikal terorisme melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan. Selain kepada 4 kelompok sasaran tersebut, program deradikalisasi juga melaksanakan program kepada pesantren, masjid-masjid, sekolah menengah atas yang rentan disusupi oleh pemahaman radikal, ormas radikal, media radikal serta perguruan tinggi yang rentan disusupi oleh pemahaman radikal.

Program deradikalisasi yang dilaksanakan di pesantren-pesantren, masjid-masjid, sekolah dan universitas merupakan program deradikalisasi yang disebut dengan program anti-radikalisasi. Anti-radikalisasi ditujukan kepada lapisan masyarakat yang belum terpapar paham radikal. Berupa penguatan-penguatan agar kelompok ini tidak hanya terjerumus, tetapi juga melawan dengan paham radikal.⁸

Namun demikian, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah selama ini belum memberikan hasil yang memuaskan. KH Sholahuddin Wahid berpendapat bahwa program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah selama ini belum mampu mencegah munculnya sikap dan perilaku radikal di tengah masyarakat.⁹

5 Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2015) p 59

6 Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta : P3M, 1986) p 101

7 Zamakhsyari Dhofier, Z, *Tradisi pesantren, Studi tentang pandangan hidup kyai*. (Jakarta: LP3ES, 2012)

8 Irfan Idris, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, (Jakarta :Cahaya Insani, 2018) p 42-43

9 NU Online, *Gus Sholah Kritik Kegagalan Program Deradikalisasi*, <http://www.nu.or.id/post/read/76825/gus->

Keberhasilan program deradikalisasi di Pesantren bergantung kepada bagaimana mengkomunikasikan program-program tersebut dengan strategi komunikasi yang tepat. Saat masyarakat masyarakat pesantren terus menerus diberikan informasi tentang bahaya radikalisme agama, atau tentang agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, maka masyarakat pesantren akan lebih memahami bahwa agama Islam tidak mengajarkan tindakan radikal tetapi mengajarkan sikap kasih sayang.

Komunikasi merupakan perencanaan yang sistematis. Maka diperlukan sebuah strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan manajemen perencanaan menyeluruh komunikasi untuk mencapai efek komunikasi yang diinginkan. Efek komunikasi dalam pembangunan didefinisikan sebagai situasi komunikasi yang memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni dan bertanggung jawab (Hamijoyo 2001).¹⁰ Strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Middleton, 1980).¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah di Pesantren di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam upaya deradikalisasi agama sebagai sebuah langkah untuk mengubah sikap dan cara pandang yang intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner menjadi toleran, moderat dan inklusif.

Penelitian dilakukan pada pesantren-pesantren di Kabupaten Sukoharjo Propinsi

Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan pertimbangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada medio Desember 2017 memetakan Solo Raya sebagai salah satu basis gerakan radikal di Indonesia sehingga menjadi lokasi program deradikalisasi.¹² Dipilih 3 pesantren yang memiliki jumlah santri lebih dari 1000 santri yaitu pesantren Imam Suhodo, Assalaam dan Al Mukmin. Sampel dalam penelitian ini adalah santri, dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 367 santri. Pemilihan santri sebagai sampel dengan menggunakan *simple random sampling*. Penentuan acak sampel dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 21. Selain sampel penelitian untuk menjawab isu-isu kuantitatif, juga dilakukan *in depth interview* dengan informan untuk mendalami isu kualitatif

Strategi komunikasi yang dikaji adalah strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah pada pelaksanaan program deradikalisasi agama. Disain strategi yang dibuat dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program dianalisis secara kualitatif. Sedangkan strategi komunikasi diukur secara kuantitatif berdasarkan persepsi terhadap komunikator, pesan, dan media yang digunakan. Diukur dengan menggunakan skala likert dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian verbal.

B. Model Perencanaan Komunikasi Deradikalisasi Agama Di Pesantren

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Instansi terkait telah merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan program deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi

sholah-kritik-kegagalan-program-deradikalisasi diakses tanggal 19 Juli 2017 Jam 21.05

10 Hamijoyo S, *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi*, (Bandung : Jurnal Mediator Volume 2 Nomor 1, 2001) p 24

11 Middleton dalam Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) p 61

12 NU online, *Kampayekan Toleransi di Solo Raya Lisan Rekrut Generasi Muda*, <http://www.nu.or.id/post/read/88863/kampayekan-toleransi-di-solo-raya-lisan-rekrut-generasi-muda>

salah satu prioritas program deradikalisasi agama. Pelaksanaan program deradikalisasi agama diwujudkan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan program deradikalisasi didesain dengan model perencanaan komunikasi deradikalisasi agama. Pelaksanaan program komunikasi deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan : perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

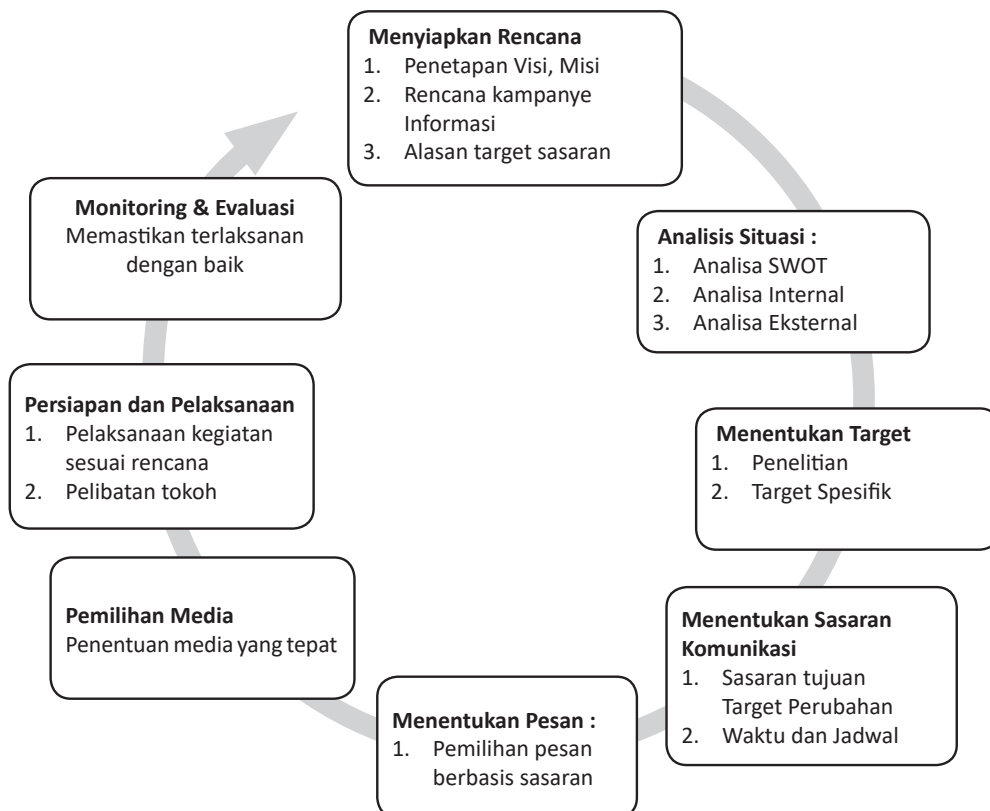
Perencanaan Model Komunikasi deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo merupakan model perencanaan yang tahapan-tahapan dan komponen kegiatannya tidak begitu berbeda dengan konsep dan teori pada model perencanaan komunikasi yang ada. Secara umum model-model tersebut memiliki proses tahapan yang relatif sama : perencanaan,

persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Pada pelaksanaan di lapangan, tahapan-tahapan model perencanaan komunikasi mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan sifat dan kondisi di lapangan. Model yang dilaksanakan dalam program deradikalisasi di Kabupaten Sukoharjo dianalisis dengan mengacu kepada 7 (tujuh) tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Petterson (2009) yaitu: menyiapkan rencana, analisis situasi, *targeting*, *communication objectives*, menentukan pesan, pemilihan media, dan evaluasi.¹³

Model perencanaan komunikasi pelaksanaan program deradikalisasi agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo sebagaimana disajikan pada gambar 2

13 Patterson, Sally J., Radke, Janet M., *Strategic Communications for Nonprofit Organizations*. (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, 2009) p 2



Gambar 2 Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo

Dalam pelaksanaan program deradikalisasi agama yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, sudah mengandung komponen strategis dalam komunikasi pembangunan seperti yang dijelaskan dalam *a guide on communication planning for community-based development* (Asian Institute of Journalism and Communication, 2012) yaitu¹⁴ :

- a. *Behavior Change Communication*: Program deradikalisasi agama dilakukan melalui interaksi dan komunikasi partisipatif untuk mendukung dan memahami program deradikalisasi. Dengan demikian program deradikalisasi dapat tersampaikan dengan baik melalui tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, ustadz/ustadzah/guru, pengurus organisasi kesiswaan. Akhirnya lingkungan mendukung program deradikalisasi agama.
- b. *Social movement*: Program deradikalisasi agama dilakukan dengan melibatkan organisasi massa untuk memberikan pemahaman dan melakukan kampanye tentang bahaya radikalisme yang pada akhirnya masyarakat mendukung program deradikalisasi.
- c. *Advocacy*: melibatkan berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya program deradikalisasi diantaranya adalah media massa serta kementerian agama kabupaten Sukoharjo sehingga mendukung dan memastikan program deradikalisasi melahirkan kebijakan yang mendukung program deradikalisasi.

Namun demikian, dalam implementasi di lapangan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang paling jelas dalam program deradikalisasi adalah adanya kesenjangan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi). Hal yang paling menonjol adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait (BNPT, Kesbangpol, dan Kementerian Agama).

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rohman :¹⁵

“Pelibatan kementerian agama dalam program deradikalisasi di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan BNPT selama ini baru terbatas kepada pelibatan peserta dari pesantren yang akan dilibatkan, belum ada koordinasi secara khusus mengenai metode dan desain pelaksanaan. Disamping itu memang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kabupaten Sukoharjo belum ada”.

Masih lemahnya koordinasi antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan deradikalisasi di Kabupaten Sukoharjo juga disampaikan Bapak Gunawan Wibisono¹⁶ :

“Selama ini kegiatan yang diselenggarakan oleh BNPT terkesan dilakukan sendiri dan kurang koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, meskipun telah dilakukan komunikasi terkait kegiatan, namun koordinasi untuk mensinkronkan pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan pemerintah daerah belum dilakukan”

14 Asian Institute of Journalism and Communication, *A Guide on Communication Planning for Community-Based Development*, (2012) p 7

15 Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Mei 2018 jam 13.30

16 Wawancara dengan Bapak Gunawan Wibisono, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 April 2018 jam 10.15

Analisis Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam tabel 1

Tabel 1 : Analisis Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo

Tahapan Yang dilakukan	Implementasi	Permasalahan dalam Pelaksanaan	Solusi Strategis
Perencanaan	a. Pemetaan dan survey awal tempat-tempat yang akan dilaksanakan program deradikalisasi b. Menyusun rencana kegiatan program deradikalisasi c. Menyusun personel yang terlibat, isi pesan, media yang digunakan dan administrasi serta logistik yang diperlukan d. Pengarahan kepada personel yang terlibat program deradikalisasi	a. Tidak dirumuskan terlebih dahulu visi dan misi, analisa SWOT, rencana kampanye serta alasan target sasaran b. Sasaran komunikasi belum terumuskan dengan baik yang meliputi sasaran tujuan, target perubahan dan waktu/jadwal c. Penentuan pesan dan media yang sesuai belum terumuskan dengan baik d. Personal yang terlibat dalam program deradikalisasi kurang memperhatikan kultur pesantren	Menyempurnakan tahapan perencanaan ke dalam langkah berikut : a. Menyiapkan rencana (penetapan visi misi, rencana kampanye Informasi, Alasan target sasaran) b. Analisis situasi (analisa SWOT, analisa internal dan eksternal) c. Mementukan target (penelitian dan target spesifik) d. Menentukan sasaran komunikasi (sasaran tujuan, target perubahan, waktu dan jadwal) e. Menentukan pesan dan media (pemilihan pesan berbasis sasaran dan penentuan media yang tepat)
Persiapan	a. Persiapan internal : persiapan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung acara. b. Persiapan eksternal : koordinasi dengan instansi, lembaga dan ormas terkait (TNI/Polri, kementerian terkait/khususnya kementerian agama, Forum Koordinasi Pencegahan terorisme (FKPT) dan instansi terkait)	a. Koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif dengan instansi terkait khususnya kementerian agama yang menaungi pesantren. b. Koordinasi dengan pimpinan pesantren perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai metode pendekatan dengan memperhatikan kultur dan karakteristik pesantren	a. Persiapan pelaksanaan yang disesuaikan dengan perencanaan yang disusun. b. Komunikasi intensif dan penyamaan persepsi dan metode pendekatan dengan pimpinan pesantren

Tahapan Yang dilakukan	Implementasi	Permasalahan dalam Pelaksanaan	Solusi Strategis
Pelaksanaan	a. <i>focus grup discussion</i> b. Seminar-seminar c. Workshop kurikulum agama d. TOT anti radikalisisasi e. Pembentukan FKPT	a. Kegiatan yang diselenggarakan masih terbatas kepada kegiatan formal dan klasikal dan belum menyentuh kepada aspek/kegiatan kultural b. Tokoh yang berpengaruh di Pesantren kurang dilibatkan dalam pelaksanaan c. Pemanfaatan media massa dan media sosial belum optimal dilakukan	a. Pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan b. Optimalisasi pelibatan tokoh (pengasuh pesantren) dalam pelaksanaan kegiatan c. Meningkatkan frekwensi kegiatan sehingga terpaan informasi program deradikalisasi lebih masif
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan selama dan pasca kegiatan	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui efek dari pelaksanaan program

C. Strategi Komunikasi Deradikalisasi Agama Di Pesantren

Pelaksanaan program deradikalisasi didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku serta rencana program deradikalisasi yang telah disusun yaitu (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme; (2) Peraturan kepala BNPT nomor : PER-01/K.BNPT/10/2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; (3) Rencana strategis BNPT tahun 2015 – 2019; (4) Rencana kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; (5) Program kerja Deputy Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi; (6) Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan deradikalisasi adalah (1) Terjadi perubahan pemahaman di kalangan kelompok

tertentu dan masyarakat secara lebih luas dari pemahaman radikal-terorisme kepada pemahaman yang lebih positif dan konstruktif. Diharapkan orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki pemahaman radikal-terorisme secara bertahap meninggalkan pemahamannya dan mulai memangun pemahaman yang anti radikal dan anti terorisme. (2) Terjalin kebersamaan dan persaudaraan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai dan mencintai untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil dan damai

Kegiatan deradikalisasi diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi: (1) Dialog keagamaan dan kebangsaan kepada pengasuh dan pimpinan pesantren maupun lembaga keagamaan di Sukoharjo; (2) Dialog keagamaan dan kebangsaan kepada santri di Pesantren dan lembaga keagamaan di Sukoharjo;

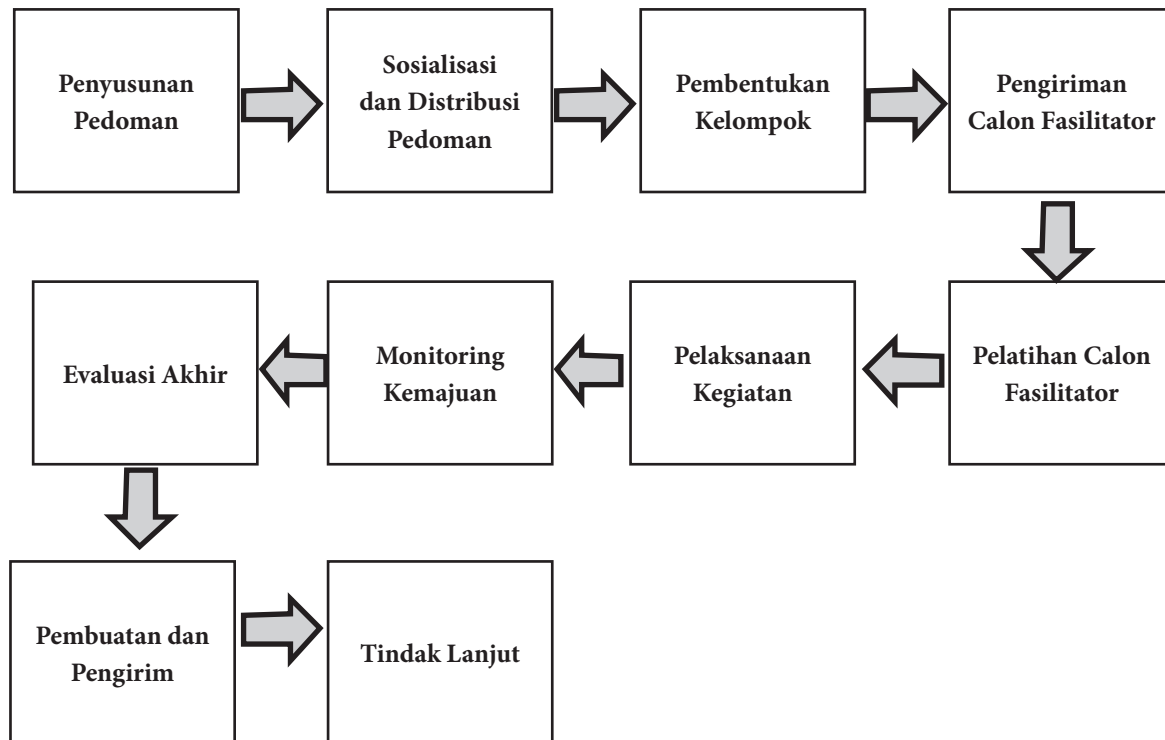
(3) Dialog keagamaan dan kebangsaan dengan guru/pengajar/ustadz di pesantren dan lembaga keagamaan di Sukoharjo; (4) Dialog keagamaan dan kebangsaan dengan pimpinan/pengurus dan anggota organisasi sosial kemasyarakatan di Sukoharjo; (5) Dialog dengan organisasi massa yang terindikasi/berpotensi radikal di Sukoharjo; (6) Dialog dengan pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan media di Sukoharjo; (7) Dialog dengan kolumnis dan kontributor opini media di Sukoharjo; (8) Dialog penangkalan penyebaran paham radikal terorisme bersama rektor/ketua/pimpinan perguruan tinggi di Sukoharjo; (9) Dialog keagamaan dan wawasan kebangsaan kepada para dosen perguruan tinggi di Sukoharjo; (10) Dialog keagamaan dan wawasan kebangsaan dengan pimpinan/pengurus organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi di Sukoharjo; (11) Dialog dengan kepala sekolah umum/ sederajat tentang program penguatan wawasan kebangsaan di kalangan siswa di Sukoharjo; (12) Dialog dengan guru agama sekolah menengah umum/ sederajat tentang program penguatan wawasan kebangsaan di kalangan siswa di Sukoharjo; (13) Dialog dengan pimpinan/pengurus organisasi kesiswaan (ROHIS) sekolah menengah umum/ sederajat tentang program penguatan wawasan kebangsaan di kalangan siswa di Sukoharjo; (14) Sharing dan dialog penangkalan penyebaran paham radikal terorisme bersama takmir, marbot dan imam masjid di Sukoharjo; (15) Dialog keagamaan dan kebangsaan bersama para da'i masjid dan muballigh di Sukoharjo; (16) Dialog keagamaan dan kebangsaan bersama pimpinan/pengurus kelompok remaja masjid dan musholla (Remais) di Sukoharjo; dan (19) Pelatihan manajemen masjid dan pemberdayaan jama'ah masjid dalam upaya

menangkal perkembangan paham radikal-terorisme di Sukoharjo

Keberhasilan program deradikalisasi dalam merubah pemahaman dari pemahaman radikal-terorisme kepada pemahaman yang lebih positif dan konstruktif akan sangat tergantung dari bagaimana mengkomunikasikan program-program tersebut dengan strategi komunikasi yang tepat. Program-program yang dikomunikasikan dengan efektif dapat merubah pemahaman dan sikap masyarakat pesantren. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai kepanjangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kesbangpol dan Kementerian Agama memegang peranan penting berhasil tidaknya program deradikalisasi agama bagi masyarakat pesantren.

Strategi komunikasi berperan untuk merubah sikap masyarakat terhadap program deradikalisasi agama di pesantren. Sehingga pesan yang yang dirancang harus dapat disampaikan secara jelas, terarah sehingga memudahkan pemahaman masyarakat pesantren untuk mengubah pemahaman dan sikap sesuai dengan yang diharapkan. Strategi komunikasi dalam hal ini adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan atau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kesbangpol dan Kementerian Agama dalam program deradikalisasi yang dianalisa dengan melihat komponen strategi komunikasi yang dinyatakan oleh Middleton yaitu komunikator, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, penerima dan pengaruh (efek).

Tahapan pelaksanaan komunikasi deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo digambarkan dalam gambar 3 :



Gambar 3 Tahapan Pelaksanaan Komunikasi Deradikalisasi

(Sumber Direktorat Deradikalisasi BNPT, 2013)

Strategi komunikasi deradikalisasi agama di kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kesbangpol (kesatuan Bangsa dan Politik) serta Kementerian agama

yang diselenggarakan di pesantren memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai tindakan preventif (pencegahan) anti radikalisme bagi civitas akademika di pesantren.

Pelaksanaan program deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo bagi pesantren tergambar dalam tabel 2

Tabel 2 Pelaksanaan program deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo bagi pesantren

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA	PEMATERI	SASARAN
1.	Halaqah Penanggulangan Terorisme/halaqah kebangsaan	BNPT, FKPT, Kesbangpol dan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	BNPT, TNI/Polri, Tokoh Agama, Akademisi serta menyertakan Mantan Pelaku Terorisme	Pengasuh dan Santri
2.	Saraschan Kebangsaan	BNPT, FKPT, Kesbangpol dan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	BNPT, FKPT Kementerian Agama RI Sukoharjo	Pengasuh dan santri
3.	Literasi Media	Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)	Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) serta praktisi media	Pengasuh dan santri

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA	PEMATERI	SASARAN
4.	Kegiatan bakti sosial bersama BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	Pengasuh dan santri
5.	Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat terhadap kegiatan Radikalisme dan Anarkisme	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo	Kesbangpol, pengasuh pesantren, TNI/Polri	Santri
6.	Halaqah dan Forum Keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kabupaten Sukoharjo	Kesbangpol dan pengasuh pesantren	Pengasuh dan Santri Senior
7	Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kabupaten Sukoharjo	Kesbangpol serta mantan pelaku terorisme.	Pengasuh dan Santri Senior
8	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kabupaten Sukoharjo	Kesbangpol, kementerian Agama	Pengasuh
9	Pembekalan Wawasan kebangsaan dan atau Pengarahan langsung	Polres dan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Polres dan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Santri

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat penerimaan santri terhadap komunikator dalam program deradikalisasi agama sebesar 69%. Hal ini dapat diartikan bahwa responden setuju dengan komunikator yang ditunjuk dalam program deradikalisasi atau komunikator yang ditunjuk tepat dan dapat diterima. Persentase capaian indikator komunikator semua pada kategori setuju. Persentase paling tinggi (74 %) adalah materi dapat berkomunikasi dengan baik kepada peserta serta sosialisasi deradikalisasi dilakukan oleh lembaga yang sesuai. Adapun persentase terendah (61%) adalah pemerintah melakukan program deradikalisasi sesuai karakteristik pesantren. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikator yang ditunjuk dalam program deradikalisasi harus lebih disesuaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing pesantren. Karena masing-masing pesantren memiliki karakteristik tersendiri.

Komunikator yang memahami kultur dan karakteristik pesantren sangat diperlukan. Komunikator yang tidak dapat memahami karakteristik dan kultur pesantren cenderung menimbulkan penolakan dari masyarakat pesantren, seperti yang diutarakan oleh ustad Ustadz Sahadi,¹⁷

“Meskipun materi yang disampaikan dalam program deradikalisasi menarik dan bagus, namun apabila materi bukan orang yang memahami pesantren atau bahkan cenderung dekat dengan pemerintah, menimbulkan kecurigaan yang pada akhirnya menimbulkan penolakan, meskipun hal tersebut tidak disampaikan secara terus terang, namun materi yang disampaikan tidak didengar. Materi yang bagus adalah materi yang dekat dengan pesantren dan terafiliasi dengan organisasi besar Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU.

¹⁷ Wawancara dengan Ustadz Sahadi, Kepala SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo pada tanggal 23 Nopember 2018 jam 15.45

Komunikator yang memiliki latar belakang organisasi massa ternama seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) lebih didengar daripada komunikator yang tidak memiliki kedekatan dengan ormas Islam dan pesantren. Komunikator yang salah akan menyebabkan pesan deradikalisasi tidak didengar dan tidak tersampaikan dengan

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan pesan yang disampaikan sebesar 71% artinya pesan-pesan yang disampaikan dalam program deradikalisasi dianggap sesuai. Persentase paling tinggi (72%) adalah kesesuaian bahasa, materi sesuai dengan kebutuhan dan materi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan persentase terendah (70%) adalah kesesuaian waktu penyampaian materi deradikalisasi. Penerimaan pesan diharapkan mampu merubah pemahaman tentang deradikalisasi yang pada akhirnya mampu merubah sikap masyarakat pesantren. Pola manajemen pesantren yang modern serta didukung oleh fasilitas penunjang yang modern seperti lcd, perpustakaan dan ruang pertemuan yang memadai lebih memudahkan dalam penyampaian pesan deradikalisasi.

Indikator selanjutnya dari strategi komunikasi yang dilaksanakan adalah media. Media komunikasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada objek pesan. Secara sederhana media komunikasi merupakan perantara yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Penggunaan media komunikasi yang tepat menjadikan penyampaian informasi efektif dan efisien.

Dari penelitian dapat diketahui dapat diketahui rata-rata tingkat capaian media sebesar 67% artinya media yang dipilih dalam program

deradikalisasi sudah tepat. Persentase paling tinggi (74%) adalah penyampaian informasi deradikalisasi melalui pengasuh pondok dan penyampaian melalui teman sesama santri. Dari penelitian dapat diketahui bahwa media yang paling efektif dalam penyampaian pesan adalah melalui pengasuh dan teman sesama santri. Sedangkan persentase terendah (58%) adalah penyampaian informasi deradikalisasi melalui program pemerintah secara langsung.

Dapat diketahui pula bahwa media yang juga memiliki kontribusi besar dalam pemahaman deradikalisasi adalah melalui pengasuh dan teman sesama. Maka penyampaian informasi dan sosialisasi melalui pengasuh dan teman sesama santri perlu diperbanyak di pesantren dalam program deradikalisasi.

Secara umum masyarakat memberikan respon positif serta menerima pesan-pesan pembangunan bila sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penerima (*receiver*). Tubbs dan Moss berpendapat guna mengetahui efektifitas komunikasi ada indikator-indikator yang bisa dijadikan ukuran yaitu¹⁸: pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan.

Rata-rata tingkat penerimaan sebesar 75% artinya santri dapat menerima program deradikalisasi. Persentase paling tinggi (81%) adalah bahwa program deradikalisasi diperlukan untuk penanggulangan radikalisme. Sedangkan persentase terendah (70%) adalah pemahaman terhadap program deradikalisasi melalui program pemerintah secara langsung.

Dari nilai persentase tertinggi dan persentase terendah di atas juga dapat diketahui bahwa kesetujuan santri terhadap

¹⁸ Tubbs dan Moss dalam Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000) p 14

program deradikalisasi diperlukan untuk penanggulangan radikalisme, menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk konsisten melakukan program deradikalisasi sehingga pemahaman terhadap program deradikalisasi melalui program pemerintah dapat ditingkatkan.

Indikator terakhir dari strategi komunikasi yang dilaksanakan adalah pengaruh (efek). Komunikasi deradikalisasi agama memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. Efek individu berupa pengaruh kebiasaan sehari-hari. Berupa perubahan sikap, perubahan tindakan dan memberikan umpan balik.

Dapat diketahui rata-rata tingkat capaian pengaruh (efek) dari strategi/proses komunikasi yang telah dilaksanakan dalam program deradikalisasi adalah sebesar 74 persen % artinya efek yang diharapkan dari komunikasi tercapai. Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa persentase paling tinggi (81%) adalah menghargai perbedaan dan menghormati kelompok lain setelah mendapatkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa efek paling kuat diperoleh setelah mendapatkan informasi tentang program deradikalisasi adalah menghargai perbedaan dan menghormati kelompok lain. Sedangkan persentase terendah (70%) adalah tidak bersikap eksklusif setelah mendapatkan informasi.

Efek dari pelaksanaan program deradikalisasi tidak hanya memberikan pengaruh kepada komunikan akan tetapi juga memberikan pengaruh kepada nilai-nilai yang berkembang di pesantren sesuai karakteristik pesantren masing-masing. Hal ini salah satunya ditandai dengan lahirnya nilai-nilai kepesantrenan sebagai acuan bermuamalah di pesantren maupun dalam kegiatan di luar pesantren.

Tabel 3 Strategi Komunikasi Deradikalisasi Agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo

No	Komponen	Skor	Rerata	Tingkat Capaian (%)
1	Komunikator	0 - 35	24,29	69
2	Pesan	0 - 20	14,28	71
3	Media	0 - 60	40,29	67
4	Penerima	0 - 20	15,00	75
5	Pengaruh	0 - 35	25,90	74
	Jumlah Rerata	0 - 170	119,76	71

Adapun sebaran persepsi terhadap strategi komunikasi deradikalisasi disajikan dalam tabel 4

Tabel 4 Sebaran persepsi terhadap strategi komunikasi deradikalisasi

No	Kategori	Persentase (%)
1	Sangat tidak setuju/sesuai	0
2	Tidak setuju/sesuai	0,3
3	Netral/ragu-ragu	13,6
4	Setuju/sesuai	74,1
5	Sangat setuju/sesuai	12
	Jumlah	100

Dari data pada tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (74,1%) setuju dengan komunikasi deradikalisasi agama yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menganggap komunikasi deradikalisasi yang saat ini dilakukan sudah sesuai. Bahkan 12% dari responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan 13,6% menyatakan netral/ragu-ragu dan 0,3% menyatakan tidak setuju/tidak sesuai. Penyempurnaan terhadap strategi/proses komunikasi yang telah dilaksanakan terkait program deradikalisasi dapat dilakukan dengan mengintensifkan strategi komunikasi dengan melihat capaian persentase dalam masing-masing indikator.

Pada indikator komunikator, persentase tertinggi adalah pemateri dapat berkomunikasi dengan baik kepada peserta serta sosialisasi deradikalisasi dilakukan oleh lembaga yang sesuai. Adapun pada indikator pesan, persentase paling tinggi adalah kesesuaian bahasa, materi sesuai dengan kebutuhan dan materi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk indikator media persentase paling tinggi adalah penyampaian informasi deradikalisasi melalui pengasuh pondok dan penyampaian melalui teman sesama santri. Sehingga dapat diketahui bahwa media yang paling efektif dalam penyampaian pesan adalah melalui pengasuh dan teman sesama santri.

Sedangkan indikator penerima persentase paling tinggi adalah setuju bahwa program deradikalisasi diperlukan untuk penanggulangan radikalisme. Sedangkan untuk indikator pengaruh (efek) persentase paling tinggi adalah menghargai perbedaan dan menghormati kelompok lain setelah mendapatkan informasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa efek paling kuat diperoleh setelah mendapatkan informasi tentang program deradikalisasi adalah menghargai perbedaan dan menghormati kelompok lain.

Demikian halnya penyempurnaan terhadap strategi/proses komunikasi yang telah dilaksanakan terkait program deradikalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki strategi/proses komunikasi dengan melihat persentase rendah/terendah dalam masing-masing indikator.

Pada indikator komunikator, persentase terendah adalah pemerintah melakukan program deradikalisasi sesuai karakteristik pesantren. Meskipun masih masuk ke dalam kategori setuju, namun kesesuaian komunikator

dengan karakteristik pesantren perlu mendapat perhatian. Hal ini dapat dipahami mengingat pemateri (komunikator) seringkali bukan orang yang dikenal lebih awal oleh para santri sehingga menimbulkan kecurigaan dan penolakan. Pemateri yang tidak dekat dengan kultur pesantren cenderung tertolak atau bisa juga disebabkan materi yang disampaikan kurang/tidak menarik sebagaimana penjelasan pada bahasan sebelumnya.

Sedangkan pada indikator pesan, persentase terendah adalah kesesuaian waktu penyampaian materi deradikalisasi. Meskipun juga masih masuk ke dalam kategori setuju, pemilihan waktu yang paling sesuai dengan dinamika pesantren harus dilakukan sehingga strategi komunikasi yang dilakukan dalam program deradikalisasi agama di pesantren dapat lebih efektif. Selanjutnya untuk indikator media persentase terendah adalah penyampaian informasi deradikalisasi melalui program pemerintah, namun masih masuk ke dalam kategori setuju. Sehingga penyampaian program deradikalisasi agama melalui program pemerintah harus dibuat lebih menarik dan kreatif.

Untuk indikator penerima persentase terendah adalah pemahaman terhadap program deradikalisasi melalui program pemerintah. Hal ini selaras dengan indikator media di atas, bahwa diperlukan program pemerintah yang lebih menarik dan kreatif dalam program deradikalisasi. Sedangkan untuk indikator pengaruh (efek) persentase terendah adalah tidak bersikap eksklusif setelah mendapatkan informasi. Meskipun masih masuk ke dalam kategori setuju, pengaruh (efek) ini harus mendapat perhatian dalam penyempurnaan program.

D. Simpulan

Model perencanaan komunikasi program deradikalisasi pada pesantren-pesantren di Kabupaten Sukoharjo merupakan model perencanaan yang tahapan-tahapan dan komponen kegiatannya tidak begitu berbeda dengan konsep dan teori pada model perencanaan komunikasi yang ada. Secara umum model-model tersebut memiliki proses tahapan yang relatif sama: perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan program deradikalisasi agama yang dilakukan pemerintah pada pesantren-pesantren di Kabupaten Sukoharjo, sudah mengandung komponen strategis dalam komunikasi pembangunan seperti yang dijelaskan dalam *a guide on communication planning for community-based development*

yaitu: (1) *Behavior Change Communication*, (2) *Social movement*, dan (3) *Advocacy*. Diperlukan penyempurnaan utamanya koordinasi antara instansi terkait (BNPT-Kesbangpol dan Kementrian Agama) dalam pelaksanaan program deradikalisasi khususnya dalam perumusan program.

Strategi komunikasi deradikalisasi agama yang dilakukan telah memenuhi komponen strategi komunikasi yang meliputi komunikator, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, penerima dan pengaruh (efek). Strategi komunikasi yang dilakukan dalam program deradikalisasi agama sudah tepat dan mampu menyampaikan pesan-pesan deradikalisasi dan mengubah persepsi masyarakat pesantren terhadap deradikalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2015. *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing
- BNPT. 2013. *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta : BNPT
- BNPT. 2016. *Petunjuk Teknis (Juknis) Program Deradikalisasi di Wilayah Solo Raya*. Jakarta : BNPT
- Cangara, Hafied 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dhofier, Z. 2012. *Tradisi pesantren, Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Hamijoyo S. 2001. *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi*, Bandung : Jurnal Mediator Volume 2 Nomor 1.
- Idris, Irfan. 2018. *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*. Jakarta : Cahaya Insani.
- Patterson, Sally J. Radke. Janet M. 2009. *Strategic Communications for Nonprofit Organizations*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Rakhmat, Jalaluddi., 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Veldhuis, T & Staun, J. 2009. *Islamist Radicalisation: A Root Cause Model*. Den Hag : Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta : P3M.
- _____. 2012. *A Guide on Communication Planning for Community-Based Development*. Asian Institute of Journalism and Communication.